



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 16 Maret 2022

1. [HOAKS] Foto Jalan Raya Cireki, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang Amblas Parah



Penjelasan :

Beredar sebuah foto yang diklaim merupakan foto Jalan Raya Cireki yang berada di wilayah Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang mengalami amblas parah hingga tak bisa dilalui kendaraan. Disebutkan pula bahwa dampak dari jalan amblas tersebut mengakibatkan kemacetan total.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, informasi yang menyebutkan bahwa Jalan Raya Cireki yang berada di wilayah Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang mengalami amblas parah adalah salah. Kepala Seksi Humas Polres Sumedang AKP Dedi Juhana menegaskan bahwa klaim pada foto yang beredar tersebut adalah hoaks. Foto tersebut adalah foto lama dan jalan tersebut bukan terletak di wilayah Sumedang. Ia juga mengimbau warga untuk bijak menggunakan media sosial dengan tidak sembarangan menyebarkan foto dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hoaks

Link Counter:

- <https://bandung.kompas.com/read/2022/03/15/203927178/beredar-foto-jalan-amblas-di-sumedang-polisi-pastikan-itu-hoaks>
- <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-133987846/hoax-foto-jalan-raya-tomo-sumedang-ambles-parah-hingga-tak-bisa-dilalui-kendaraan>
- <https://jabar.tribunnews.com/2022/03/15/beredar-kabar-jalur-sumedang-cirebon-tidak-bisa-dilalui-kendaraan-akibat-ambles-polisi-itu-hoaks>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 16 Maret 2022

2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Kapolres Nias



Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Kapolres Nias, AKBP Wawan Iriawan. Terlihat akun tersebut mencatut nama serta foto AKBP Wawan Iriawan.

Dilansir dari akun Facebook Tribrata Polres Nias, mengunggah tangkapan layar akun Facebook palsu tersebut dan menambahkan stempel hoaks. Pihaknya mengimbau untuk tidak menanggapi apabila ada yang meminta pertemanan atau meminta sesuatu mengatasnamakan Kapolres Nias, AKBP Wawan Iriawan.

Hoaks

Link Counter:

- <https://m.facebook.com/photo.php?fbid=974329226551402&id=100019230014631&set=a.120560241928309&source=48>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 16 Maret 2022

3. [HOAKS] Lowongan Kerja Tenaga Vaksinator di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon



Penjelasan :

Beredar selebaran di media sosial yang menginformasikan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon membutuhkan tenaga untuk posisi staf vaksinasi *booster*, staf kantor pelayanan kesehatan dan tata usaha (TU). Dalam selebaran tersebut terdapat logo Kementerian Kesehatan RI dan Gernas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinkes Kabupaten Cirebon, dr. Edi Susanto menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks. Pasalnya, pihaknya dan BKPSDM serta Pemda Cirebon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang rekrutmen seperti yang beredar di media sosial. Selain itu, menurutnya, rekrutmen yang resmi dari Dinkes memiliki tata cara dan SOP-nya. Saat proses rekrutmen dibuka, maka akan melibatkan tim rekrutmen dengan regulasi yang jelas serta menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaannya.

Hoaks

Link Counter:

- <https://suaracirebon.com/2022/03/16/info-lowongan-kerja-tenaga-vaksinator-di-dinas-kesehatan-kabupaten-cirebon-hoaks/>
- <https://fajarcirebon.com/dinkes-kabupaten-cirebon-tegaskan-selebaran-rekrutmen-adalah-hoax/>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 16 Maret 2022

4. [DISINFORMASI] Pejabat Kesehatan Australia Mengakui Orang yang Divaksinasi Covid-19 Sekarat karena Miokarditis



Penjelasan :

Sebuah video beredar di media sosial yang mengklaim bahwa video itu menunjukkan seorang pejabat tinggi kesehatan Australia mengakui orang yang divaksinasi Covid-19 sekarat karena miokarditis.

Faktanya, video tersebut telah dipotong dan dibagikan dengan konteks yang keliru. Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), video tersebut merupakan rekaman pidato Kepala Petugas Kesehatan Queensland John Gerrard saat berbicara tentang kematian miokarditis pada pasien Covid-19 dan bukan orang yang divaksinasi Covid-19. Regulator Obat Australia juga turut menegaskan bahwa sejauh ini belum mencatat kematian miokarditis yang disebabkan oleh vaksin Covid-19. Berdasarkan laporan keamanan vaksin Covid-19 dari Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia, pada 10 Maret 2022 menyebutkan jika miokarditis merupakan efek samping, tetapi sangat jarang terjadi pada vaksin Pfizer dan Moderna. Meski demikian, biasanya efek tersebut hanya sementara, dan kebanyakan orang menjadi lebih baik dalam beberapa hari.

Disinformasi

Link Counter:

- <https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.324P26H>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 16 Maret 2022

5. [DISINFORMASI] Pendamping Sertifikasi Halal UMKM Harus dari GP Anshor



Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook informasi yang mempertanyakan "Kenapa pendamping Sertifikasi Halal bagi UMKM syaratnya harus dari GP Anshor? Kenapa tidak MUI saja yang netral? Kalau UMKM yang dianggap musuh, apakah akan dipersulit pengurusan sertifikasi halalnya?".

Faktanya, informasi yang menyebutkan Pendamping Sertifikasi Halal, atau yang disebut Pendamping PPH (Proses Produk Halal) harus berasal dari GP Anshor adalah informasi yang salah. Sesuai dengan Permenag No 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 sedangkan kriteria bagi organisasi kemasyarakatan Islam yang bisa menjadi organisasi yang melakukan pendampingan PPH dijelaskan dalam Pasal 6. Sesuai dengan aturan ini, maka tidak hanya GP Anshor yang bisa terlibat, organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah pun juga sudah terlibat. Selain itu, organisasi kemasyarakatan Islam selama memenuhi persyaratan juga bisa bergabung.

Disinformasi

Link Counter:

- <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2021/bn1043-2021.pdf>
- <https://www.kemenag.go.id/read/gelar-tot-bpjph-percepat-penyiapan-pendamping-proses-produk-halal-umk-5v8jn>
- <https://news.detik.com/berita/d-5846970/sejumlah-ormas-islam-akan-dampingi-umk-dapat-sertifikasi-halal>
- <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1615.pdf>